DAFTAR ISI

NO	NAMA	JUDUL	HALAMAN
A.	**PEMATERI**		
1	Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, SH.,M.Hum	Penguatan Demokrasi Menuju Terwujudnya Mekanisme Checks and Balances dan Kesejahteraan Rakyat	1-8
2	Dr. Refly Harun, SH.,MH.,LL.M	Pemilu Serentak : 2019 dan Penguatan Sistem Presidensil di Indonesia	9-24
3	Dr. Sulardi, SH.,MH	Membangun Demokrasi, menyelenggarakan Pilkada yang bermartabat	25-31
4	Rahmat Muhajir Nugroho, SH.,MH	Konstitusionalitas Penetapan Calon Terpilih Dengan Suara Terbanyak	32-43
5	Dr. Asri Wijayanti. SH.,MH	Perlindungan Pekerja Dalam Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu 2019	44-54
6	Aries Isnandar, SH.,MH	IMPLIKASI HUKUM PILKADA (Mensikapi kasus suap / politik uang)	55-66
7	Ibnu Sina Chandranegara, SH.,MH	Integritas Pemilu Dan Pemilu Berintegritas	67-75
B.	**ASPEK HUKUM TATA NEGARA**		
8	Jamaludin Ghafur & Allan Fatchan Gani Wardhana	Urgensi *Presidential Threshold* Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019	76-90
9	Muhamad Saleh	Perluasan Kewenanagan Bawaslu dalam Mengawasi dan Menegakkan Peraturan Keungan Partai Politik	91-102
10	Tomy Michael	Menuju Pemilu 2019 Dengan Negara Integralistik Milik Soepomo	103-106
11	Asri Agustiwi	Aspek-Aspek Perubahan Sosial Yang Berhubungan Dengan Perubahan Hukum	107-120
12	Syafullahil Maslul	Ambang Batas (presidential threshold) pemilu 2019 ditinjau dari teori tujuan hukum	121-129
13	Rani Sri Agustina, Pipih Ludia Karsa, Fatkhul Muin & Agus Prihartono PS	Prinsip Prinsip Hak Asasi Manusia Di Tinjau Dari Perspektif "Philosofische Grondslag" Dan Konstitusi	130-138
14	Siti Hasanah	Kualitas Produk Legislasi Di Indonesia (Studi: Komparasi Kualitas Produk Legislasi DPR Hasil Pemilu Sistem Proporsional Tertutup dan Sistem Proporsional Terbuka)	139-148
15	Iswanto	Analisa Kritis Terhadap Sistem Penetapan Calon Terpilih Dengangan Suara Terbanyak Dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	149-162

16	Dwi Putri Cahyawati	Kajian Konstitusional Terhadap Makna Keterlibatan Presiden Pada Proses Pembentukan Undang-Undang Dalam Format Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	163-171
C.	**ASPEK HUKUM PIDANA**		
17	Dewi Iriani	Tinjauan Analisis Terhadap Mahar Politik Dan Korupsi Kepala Daerah Presfektif Hukum Tata Negara Dan Hukum Pidana (Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia yang beritergritas)	172-183
18	Wendra Yunaldi	Ancaman Demokrasi Rente Terhadap Demokrasi Berkedaulatan Rakyat	184-193
19	Alfalachu Indiantoro, Ida Yeni Rahmawati & Muridah Isnawati	Potensi Tindak Pidana Dalam Pimilukada Serentak Tahun 2018	194-201
20	Ujuh Juhana & Deden Taufik	Kedudukan Dan Peran Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana Pemilu	202-216
21	Sudarto	Perjanjian Menegenai Mahar Politik Dan Akibat Hukumnya	217-223
22	Mokhammad Najih	Membangun Pemilihan Kepala Daerah Serentak Yang Bersih Dari Anasir Korupsi	224-235
23	Nanda Sahputra Umara	Pesona Korupsi Dalam Praktek Pemilu Di Indonesia	236-243
D.	**ASPEK DEMOKRASI**		
24	Rheza Firmansyah	Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia	244-253
25	Sryani Br. Ginting	Penguatan Demokrasi Di Indonesia Dalam Pemilu 2019 (Tinjauan Yuridis Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)	254-264
26	Robby Darwis Nasution	Penegakan HAM Dalam Sistem Demokrasi Kontemporer	265-280
27	Susiyanto & Randy Pradityo	Dinamika Perselisihan Dan Penguatan Internal Partai Politik	281-288
28	Mikho Ardinata & Sidiq Aulia	Konseptualisasi Negara Hukum Dan Demokrasi	289-294
29	Surisman & Inayah	Demokrasi Dan Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung Di Indonesia	295-303
30	Ahmad & Amiludin	Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia	304-314
31	Susani Triwahyuningsih	Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam proses demokratisasi	315-321
32	Martha Eri Safira & Imam Abdul Rohim	Restorasi Demokkrasi Dalam Menyambut Pesta Pemilu Akbar Di Indonesia Tahun 2019	322-333

33	Wawan Fransisco & Agustinus Samosir	Pemilukada Sebagai Wadah Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis	334-348
34	Ismet Hadi & Sitti Magfirah Makmur	Tinjauan Yuridis Konversi Sempadan Danau Limboto Antara Hak Warga Negara Dan Kewenangan Pemerintah Daerah Di Era Demokrasi Partisipatoris Di Kabupaten Gorontalo	349-367
35	Dimas Firdausy Hunafa & Dio Ekie Ramanda	Menggagas Peluang Calon Presiden dan Wakil Presiden Perseorangan Sebagai Upaya Penguatan Demokratisasi Pemilu di Indonesia	368-379
E.	**ASPEK HUKUM PERDATA**		
36	Wafda Vivid Izziyana, Arief Budiono & Septarina Budiwati	Pemilu Serentak Antara Partisipasi Dan Penghematan Anggaran Negara	380-387
F.	**ASPEK HUKUM ISLAM**		
37	Rizka	Pemilu Berintergritas Untuk Demokrasi Yang Berkualitas Menurut Pandangan Islam	388-395
38	Elviandri, Sigit Sapto Nugroho & Muhammad Tohari	Pemilu dalam Sorotan Maqashid Al-Syari'ah	396-406
39	Hifdhotul Munawaroh	Demokrasi Dalam Islam (Tinjauan Historis Pemilihan Kepala Negara Dalam Islam)	407-420
40	Fauzan Muhammadi & Wita Setyaningrum	Musyawarah Hukum : Kajian Usul Fikih terhadap Kebijakan Khulafaurrasyidin	421-431
G.	**ASPEK KEWARGANEGARAAN**		
41	Yogi Prasetyo & Ferry Irawan Febriansyah	KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat	432-443
42	Ashinta Sekar Bidari	*Inequality* Kaum Penyandang Disabilitas Dalam Pesta Demokrasi Pemilu	444-450
43	Hanafi Arief	Hak – Hak Konstitusional Wanita Dalam Pemilu	451-458
44	M. Iksan & Resky Gustiandi Candra Imansyah	Penguatan Integritas Pemilu Melalui Sikap *Tabayyun* Sebagai Bentuk Pengurangan *Black Campaign* dan *Negative Campaign*	459-470
45	Anang Doni Irawan	Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Mewujudkan Pemilu 2019 Yang Adil Dan Berintegritas	471-477
46	Nur Amalia & Hijrotul Arshadah	Hak Aktifitas untuk Melakukan Kegiatan Politik Praktis bagi Dosen PNS dpk.	478-489
H.	**HUKUM INTERNASIONAL**		
47	Satria Unggul Wicaksana Prakasa	Potensi Spying Election Pada Pilpres RI 2019: Kajian Hukum Internasional	490-500
48	Albert Lodewyk Sentosa Siahaan	Empat Pilar Kebangasaan Sebagai Pemersatu Bangsa Dalam Menghadapi Intoleransi	501-511
49	Alum Simbolon	Pelaksanaan Pemilihan Umum Secara Demokrasi Yang Berintegritas Tahun 2019	512-516